

BAB II

POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT

Politik luar negeri Amerika Serikat telah melalui sejarah panjang dan banyak sekali perubahan sebelum akhirnya dikenal sebagai negara adikuasa yang kita ketahui saat ini. Identitas yang dimiliki Amerika Serikat tidak terlepas dari Namun untuk membahas persoalan keputusan Amerika Serikat untuk mendukung Filipina dalam konflik Laut China Selatan, penulis membatasi pembahasan perkembangan politik luar negeri Amerika Serikat pasca Perang Dunia II saja.

A. Sejarah dan Perkembangan Politik Luar Negeri Amerika Serikat

Istilah “*Three headed eagle*” telah dikenal secara umum sebagai metafora yang menggambarkan kondisi perpolitikan luar negeri Amerika Serikat pasca Perang Dunia II. Dalam metafora tersebut, setiap kepala elang merepresentasikan fase-fase yang dilalui Amerika Serikat hingga mencapai kondisi perpolitikan seperti saat ini. Fase-fase tersebut ialah; fase *Cold war Internationalism*, fase *Post-Cold war Internationalism*, dan fase *Isolationism*. (Holsti, 2006, hal. 90).

Pada fase *Cold War Internationalism*, Holsti mengemukakan, bahwa pasca Perang Dunia II, banyak terjadi transformasi-transformasi yang terjadi secara samar namun jelas terjadinya. Salah satu transformasi yang terjadi adalah pergeseran sistem ekonomi Liberal yang saat itu menjadi sistem ekonomi utama dunia, ditentang oleh negara-negara dunia kedua dan ketiga yang menuntut “*New International Economic Order*”. Hal ini kemudian mengguncang tatanan dunia saat itu, sehingga muncul blok-blok bipolar yang berasal dari aliansi-aliansi negara-negara yang memiliki kepentingan yang searah. Dua blok bipolar tersebut adalah blok Barat (Amerika Serikat) dan blok Timur (USSR).

Kedua blok tersebut mewakili masing-masing ideologi yang dibawa, blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dengan

Liberalisme dan blok Timur yang dipimpin USSR dengan komunisme. Pada awalnya, setelah Nazi-Jerman dikalahkan dalam Perang Dunia II, komunisme berkembang pesat di Eropa Timur. Amerika Serikat dan Inggris mengkhawatirkan pengaruh komunisme akan terus berkembang dan masuk ke Eropa Barat dan mengalahkan pengaruh Liberalisme dan menjatuhkan demokrasi yang menjadi ideologi Amerika Serikat dan sekutunya. (Encyclopedia Britannica, 1998).

Tokoh-tokoh seperti George F. Kennan, Hans Morgenthau, dan para penganut faham Wilsonian, menilai politik luar negeri Amerika Serikat saat itu terlalu dipengaruhi oleh ketakutan akan ancaman pengaruh komunisme dan komitmen yang terlalu tinggi untuk mempertahankan ideologi Demokrasi Liberal, sehingga Amerika Serikat saat itu banyak ikut campur dalam urusan negara lain meskipun hal tersebut tidak memiliki hubungan dengan kepentingan negaranya sendiri. (Saul, 2012, p. 61)

Pada fase ini, Amerika Serikat mengalami *age of consensus*, dimana Amerika Serikat sebagai penggerak blok Barat bertindak sebagai pelindung negara-negara dibawah aliansinya dari komunis USSR. Keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam menjadi contoh aksi Amerika Serikat bertindak sebagai "*World Police*" dengan alasan melindungi sekutu dalam blok yang dipimpinnya.

Meski kekuatan dunia telah dipegang oleh kedua negara adikuasa, Amerika Serikat dan USSR, setiap perubahan dan kemajuan dunia tidak lepas dari pengaruh kedua negara ini. Tetapi keberadaan UN masih memegang kontrol atas sistem tatanan dunia, setiap prospek perubahan-perubahan yang muncul dari kedua negara adidaya tersebut masih harus disetujui oleh UN untuk dapat diadopsi oleh negara-negara di dunia. Peran UN sebagai administratif ini yang kemudian mengubah kecenderungan politik Amerika Serikat untuk bersifat sedikit lunak dan "jinak" agar mendapat persetujuan dari UN. (Holsti, 2006)

Pada fase kedua, *Post-Cold War Internasionalism*, kekuatan dunia telah dipegang oleh kedua negara adikuasa Amerika Serikat dan USSR, setiap perubahan dan kemajuan

dunia tidak lepas dari pengaruh kedua negara ini. Tetapi keberadaan UN masih memegang kontrol atas sistem tatanan dunia, setiap prospek perubahan-perubahan yang muncul dari kedua negara adidaya tersebut masih harus disetujui oleh UN untuk dapat diadopsi oleh negara-negara di dunia. Peran UN sebagai administratif ini yang kemudian mengubah kecenderungan politik Amerika Serikat untuk bersifat sedikit lunak dan “jinak” agar mendapat persetujuan dari UN. Tuntutan dari negara-negara dari dunia ke-3 yang sudah merasa cukup akan ketergantungan pada negara lain, menurunkan keefektifitasan dari *interdependence* negara-negara ini dengan kedua kekuatan bipolar Amerika Serikat dan USSR serta melahirkan *nationalism* baru di negara-negara tersebut.

Keharusan Amerika Serikat bertanggung jawab atas beban untuk memimpin dan menjamin keselamatan negara-negara non-komunis yang menjadi sekutunya dari pengaruh komunis pada masa *Cold War*, menciptakan suatu keadaan ketergantungan dalam tatanan dunia. Penyalahgunaan kekuasaan yang sering dilakukan oleh pihak-pihak yang memegang kekuatan mengundang banyak kritikan dan sudah seharusnya untuk tidak dilanjutkan. Salah satunya diungkapkan oleh Kristol (1976:16):

We have for too long lived with the illusion that the prime purpose of our foreign policy should be to restrict and eventually eliminate the use (and abuse) of power in international affairs. The moral intention is splendid but Utopian, since much of the world does not share it. We know that power may indeed corrupt. We are now learning that, in the world of nations as it exists, powerlessness can be even more corrupting and demoralizing. (Holsti, 2006)

Pada fase ketiga, yakni *Isolationism*, memiliki dampak yang berbeda seperti kedua fase-fase diatas. Holsti menggambarkan pada fase *Cold War*, telah memecah negara-negara menjadi Timur dan Barat, dalam fase *Post-Cold War*, negara-negara dunia terpecah menjadi Utara dan Selatan. Tetapi pada fase ketiga yang dialami Amerika Serikat tidak lagi

memecah negara-negara di dunia, melainkan memecah opini di dalam negeri Amerika Serikat sendiri. Setelah kegagalan Amerika Serikat meraih kemenangan pada Perang Vietnam, banyak politikus-politikus yang memaksa agar pemerintah Amerika Serikat menyudahi kebijakan untuk mencampuri urusan politik negara lain. Hal ini dikarenakan banyak pihak yang merasa setelah kolapsnya USSR, Amerika Serikat sudah tidak lagi perlu mengkhawatirkan penyebaran paham komunis di dunia. Banyaknya dana yang habis akibat kedua fase sebelumnya juga mengancam kelangsungan ekonomi negara. Maka setelah keruntuhan USSR (*Post-Cold War*), banyak tuntutan masyarakat agar pemerintah Amerika Serikat mulai mengurus perihal dalam negerinya sendiri, memperbaiki ekonomi yang menurun setelah banyaknya modal yang dikeluarkan saat *Cold War*, daripada memfokuskan diri kepada masalah-masalah eksternal.

Ketiga fase baik *Cold War Internasionalism*, *Post-Cold War Internasionalism*, dan juga fase *Isolationism* telah membentuk politik luar negeri Amerika Serikat seperti sekarang, politik "*Global foreign policy*" tercipta dari fase *Cold War* yang menuntut Amerika Serikat menjadi polisi dunia yang melindungi kepentingan sekutu-sekutunya, dan dari fase *Post-Cold War* yang menuntut Amerika Serikat untuk dapat menarik simpati negara-negara lain agar mengikuti setiap kebijakan yang diterapkannya. Dan pada fase *Isolationism* Amerika Serikat belajar untuk memanfaatkan posisinya di pemerintahan internasional tersebut untuk memenuhi kepentingan-kepentingan dalam negerinya.

Meskipun perkembangan Amerika Serikat tidak selalu berjalan mulus, seperti misalnya kegagalan *Peace of Versailles*, *Great Depression* yang melanda perekonomiannya, dan kolapsnya pihak poros, namun kegagalan-kegagalan tersebut lah yang kemudian menjadikan "*Global Foreign Policy*" menjadi kontur yang sempurna bagi politik luar negeri Amerika Serikat.

B. Politik Luar Negeri Amerika Serikat di Asia-Pasifik

Setelah mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi politik luar negeri Amerika Serikat, kita telah

memahami bahwa peran Amerika Serikat sebagai “polisi dunia” memang layak disandang oleh Amerika Serikat mengingat bahwa Amerika Serikat memiliki pengalaman dan kemampuan dalam menjaga kestabilan tatanan dunia. Pengaruh Amerika Serikat tidak hanya berada di kawasan sekitarnya atau pada negara-negara Eropa yang menjadi sekutunya saja. Melalui “*Global foreign policy*”, Amerika Serikat berhasil mencapai *World order interest* nya, terbukti dengan fakta bahwa dunia saat ini hampir seluruhnya menganut paham *Liberal democracy* yang dibawa oleh Amerika Serikat.

Wilayah Asia-Pasifik juga tidak luput dari pengaruh Amerika Serikat. Setiap aspek politik, ekonomi, dan sosial negara-negara di wilayah ini banyak mendapat pengaruh dari negara-negara luar. Hampir semua negara-negara di kawasan Asia-Pasifik merupakan wilayah bekas kolonial negara-negara Barat, maka sedikit banyak telah terjadi integrasi sosio-politik pada negara-negara bekas jajahan tersebut. Namun Liberalisme seperti yang kita kenal sekarang baru ada sekitar 40 tahun yang lalu, setelah Amerika Serikat mempromosikan Demokrasi sebagai tindakan pencegahan dari penyebaran Demokrasi.

Sebelumnya, pemahaman mengenai kebebasan ekspresi dan hak asasi belum dikenal dalam masyarakat Asia-Pasifik. Selama berabad-abad lamanya, masyarakat di kawasan ini hanya mengenal pemerintahan Imperialis atau kerajaan. Kedatangan penjelajah-penjelajah Eropa pada masa eksplorasi juga tidak mengubah fakta bahwa masyarakat di kawasan ini belum mengenal konsep kebebasan dan hak hidup, karena penjelajah-penjelajah tersebut tidak hanya bertujuan untuk membuka jalur perdagangan melainkan juga membawa Feodalisme, sebuah konsep baru yang lebih kejam namun masih merupakan sistem yang tidak jauh berbeda dari pemerintahan kerajaan yang telah lama ada didalam masyarakat tersebut. (Mitchell, 2017)

Sampai pada masa pasca Perang Dunia II, ketika negara-negara Eropa disibukkan untuk fokus berbenah memperbaiki keadaan dalam negeri negaranya dan angkat kaki dari wilayah-wilayah jajahannya, terjadi perubahan dalam sistem di wilayah

yang ditinggalkan tersebut. Nasionalisme tumbuh dan berkembang secara masif, tetapi masih relatif rapuh karena sebelumnya konsep tersebut belum dikenal sebelumnya. Negara-negara baru bekas jajahan dengan semangat nasionalisme membara masih sangat mudah terpengaruh dan mengadopsi sebuah sistem yang berasal dari luar, saat itu, dua faham yang siap untuk masuk kedalam negara-negara tersebut adalah faham Liberal dan Komunis.

Pada saat itulah Amerika Serikat sebagai garda terdepan pembela faham Liberal mencegah agar faham Komunisme tidak masuk dan mempengaruhi negara-negara baru merdeka dikawasan tersebut. Amerika Serikat secara konstan mempromosikan Demokrasi sebagai ajaran dari faham Liberal ke negara-negara tersebut. Usaha Amerika Serikat itu terbilang sukses karena saat ini hampir seluruh negara di kawasan Asia-Pasifik menganut sistem Demokrasi Liberal seperti yang diharapkan.

Setelah terintegrasi lewat faham yang sama, Amerika Serikat dapat dengan mudah melakukan pengawasan dan kontrol di kawasan itu. Pada kasus kawasan Asia-Pasifik, Amerika Serikat memiliki beberapa sekutu yang di monitor langsung oleh Amerika Serikat dan dijadikan basis politiknya didalam kawasan tersebut. Negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan adalah contoh negara yang sukses menjadi negara maju setelah menganut sistem Demokrasi Liberal dan mendapat bantuan dan bimbingan dari Amerika Serikat.

Namun ada juga negara yang terhitung “gagal” menjadi sekutu Amerika Serikat. Myanmar yang baru saja menganut sistem Demokrasi Liberal mengalami guncangan dalam negeri pada masa transisinya. Pelanggaran HAM di Rohingnya menjadi indikator kegagalan Amerika Serikat di Myanmar karena HAM merupakan isu utama paling diperhatikan oleh Amerika Serikat. Selain Myanmar, Filipina yang menjadi sekutu utama Amerika Serikat juga dinilai “gagal” setelah Filipina diawal pemerintahan Duterte berpaling dari Amerika Serikat kepada China, namun belakangan Filipina kembali memperbaiki hubungannya dengan

Amerika Serikat setelah berkonflik dengan China dalam kasus Laut China Selatan.

Selain menggunakan isu politik, Amerika Serikat juga menggunakan aspek ekonomi sebagai strategi untuk menjaga pengaruhnya di kawasan Asia-Pasifik. Negara-negara seperti China yang telah menganut sistem komunis, serta Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam sebagai negara dengan basis Islam tidak bisa dikontrol secara langsung oleh Amerika Serikat karena telah memiliki sistem mereka masing-masing, oleh karena itu isu ekonomi menjadi opsi bagi Amerika Serikat untuk mengontrol negara-negara tersebut.

Contoh strategi ekonomi yang dijalankan Amerika Serikat dengan negara-negara Asia-Pasifik adalah dengan dibentuknya TPP (*Trans Pacific Partnership*). Melalui TPP Amerika Serikat membentuk hubungan *free trade* dengan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik dan dapat mengontrol perdagangan di kawasan Asia yang saat ini dikuasai oleh China. Pembentukan TPP adalah salah satu pencapaian perdagangan terbesar yang pernah dilakukan oleh Amerika Serikat, selain sebagai strategi untuk memajemen pengaruhnya di kawasan Asia-Pasifik.

C. Kekuatan Militer Amerika Serikat

Amerika Serikat yang saat ini memainkan peran sebagai polisi dunia tidak terlepas dari besarnya kekuatan militer yang dimilikinya. Dimulai pada masa *Cold War*, peran Amerika Serikat sebagai polisi dunia memang sangat dibutuhkan. Mengingat kekuatan dunia saat itu bersifat bipolar dan sekutu-sekutu yang dimiliki oleh Amerika Serikat saat itu masih memiliki kekuatan militer yang lemah, karena saat itu negara-negara tersebut baru dalam masa pemulihan pasca Perang Dunia II.

Armed Race antara Amerika Serikat dan USSR saat itu merupakan sebuah keharusan hingga titik dimana kedua negara mencapai kondisi *zero-sum game*. Kekuatan militer kedua negara begitu besar, sehingga apabila terjadi *direct war* antara kedua negara tersebut, dapat dipastikan kedua negara sama-sama akan

mengalami kehancuran total. Kedua negara terus menambah persediaan gudang senjata mereka, mulai dari senjata konvensional, tank baja, kapal-kapal dan pesawat tempur, hingga bom nuklir.

Namun ketika USSR mengalami kolaps pada tahun 1990an, meninggalkan Amerika Serikat sebagai pemilik tunggal kekuatan militer terkuat di dunia. Meskipun Russia masih mewarisi sebagian besar persenjataan dari USSR, namun Amerika Serikat masih mengungguli Russia karena sebagian lagi dari warisan persenjataan USSR berupa bom-bom nuklir terletak di negara-negara satelit USSR. (Peña, 2017)

Dengan anggaran sebesar 587 miliar USDollar, Amerika Serikat menempati peringkat pertama negara dengan kekuatan militer terkuat didunia berdasarkan Global Power Index dan Credit Suisse. Memiliki total 2.363.675 personel militer, didukung dengan 8,848 kekuatan tank baja, 15,293 pesawat tempur, 290 kapal perang, dan 10 kapal induk, membawa armada Amerika Serikat mengungguli Russia dan China yang masing masing menempati urutan kedua dan ketiga. Skor nyaris sempurna dicetak Amerika Serikat dengan nilai 0,0857 (dengan anggapan nilai 0,0 sebagai nilai sempurna). (Global Fire Power; Credit Suisse, 2017)

Besarnya kekuatan persenjataan Amerika Serikat tidak menjadi jaminan kesuksesan militer Amerika Serikat. Terdapat elemen-elemen lain yang menjadi faktor kesuksesan tersebut, diantaranya adalah ketepatan penggunaan besarnya senjata dan personil dalam menangani musuh. Keputusan-keputusan tersebut menjadi pertanggungjawaban presiden sebagai panglima tertinggi dan masukan-masukan lembaga-lembaga dibawah Departemen Pertahanan. Faktor lain adalah seberapa besar kekuatan lawan, seberapa jauh lokasinya, dan seberapa penting kedudukannya di dalam tatanan internasional. (Heritage.org, 2017)